

ABSTRAK

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat, baik di pemerintahan desa maupun pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayai kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau salah satu aspek yang ikut serta dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, karena ada beberapa variabel yang ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. objek penelitian yang ditetapkan oleh penulis yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti yaitu pengaruh alokasi dana desa, anggaran belanja desa terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Dan peneliti menetapkan objek penelitiannya adalah pemerintahan desa pada 3 desa Randuharjo, desa Sekargadung, desa Kalipuro

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terhadap Kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa diperoleh dari laporan keuangan yang berada pada arsip desa, sama halnya dengan data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, data yang diambil mulai tahun 2014-2019. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya jika ADD dan APBDes bernilai tinggi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dan kemiskinan juga berpengaruh positif dan signifikan. Artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan maka kesejahteraan masyarakat akan menurun.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, APBDes, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

ABSTRAC

In the development of the public sector in Indonesia today is the strengthening of accountability demands by the community, both in the village and central government. Government Regulation No. 71 of 2010 concerning government accounting standards explains that accountability is responsible for managing resources and implementing policies that are trusted to reporting entities in achieving periodically set goals. According to Government Regulation No. 72/2005, challenged the Village, it is said that the village is a unit of the general public that has territorial boundaries authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on local origins and customs that are recognized and respected in the Unitary State Government system. Republic of Indonesia. According to Law No. 6 of 2014 concerning Villages, what is meant by villages is the legal community unit that has the territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of the local community based on community praxara, the right of origin, or one of the aspects participating in village development is village finance and village assets.

In this study the authors used a quantitative method with a descriptive approach, because there were several variables that were examined in relation to the purpose of presenting a picture of the relationship between the variables studied. the object of research determined by the author in accordance with the problem to be investigated, namely the influence of the allocation of village funds, village spending on poverty and public welfare. And the researchers determined the object of the research was the village administration in 3 Randuharjo villages, Sekargadung village, Kalipuro village

The purpose of this study is to analyze the influence of Village Fund Allocation (ADD) and Village Budget (APBDes) on poverty and community welfare. Village Fund Allocation and Village Expenditure Budget are obtained from financial reports in the village archives, as well as data on poverty and community welfare, data taken from 2014-2019. The results of this study are that the existence of the Village Fund Allocation (ADD) and the Village Budget (APBDes) have a positive and significant effect on people's welfare. This means that if ADD and APBDes are of high value, community welfare will increase. And poverty also has a positive and significant effect. This means that the higher the level of poverty, the people's welfare will decrease.

Keywords: Village Fund Allocation, APBDes, poverty and community